

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku

- Antlov, H. (2003). *Negara Dalam Desa*, Yogyakarta: LAPPERA.
- Abdullah Dindin G. (2015). *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Amanulloh Naeni. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dwiyanto, Agus. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Huda Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- John T. Ishiyama dan Marijke breuning. (2013). *Ilmu Politik dalam Paradigma abad ke 21*. Jakarta: Kencana Prenada media group.
- Kurniawan Borni. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Kumorotomo Wahyudi. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy J Moleong,. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mariana Dina, Handayani Suci. (2014). *Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. Yogyakarta.
- M. Silahuddin. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- N. Dunn William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soleh Chabib & Rochmansjah Heru. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Suharto Didik G.. (2016). *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979, UU No.22/1999, dan UU No.32/2004 serta perspektif UU No. 6/2014)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso Lukman Az. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso. (2003). *Pembaharuan Desa secara partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_.(2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Yansen. (2014). *Revolusi Dari Desa “Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Zaini Mochammad. (2015), *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

### **Daftar Jurnal**

Faridah, f. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes). *Jurnal ilmu & riset akuntansi*, 4(5).

Dhani, t. F., suhaimi, e., & maulana, t. A. (2016). Analisis implementasi alokasi dana desa pada kota lhokseumawe tahun 2015. *Jurnal ekonomi dan kebijakan publik indonesia*, 3(1), 49-65.

Sumiati, s. (2015). Pengelolaan alokasi dana desa pada desa ngatabaru kecamatan sigi biromaru kabupaten sigi. *Katalogis*, 3(2).

Suparman, e. (2014). Implementasi program alokasi dana desa di kecamatan sukadana kabupaten kayong utara. *Jurnal program magister ilmu sosial universitas tanjungpura*, 4(0004).

- Azwardi, A. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29-41.
- Mamelo, g. Y. R., kalangi, l., & lambey, l. (2016). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada desa-desa dalam wilayah kecamatan kotamobagu timur, kota kotamobagu. *Jurnal riset akuntansi dan auditing" goodwill"*, 7(2).
- Devi, n. P. C. S., erviantono, t., & supriyani, n. W. (2016). Fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut uu no. 6 tahun 2014 (studi kasus di desa riang gede kecamatan penebel kabupaten tabanan). *Citizen charter*, 1(1).
- Lestari, a. K. D., atmadja, a. T., se, a., adiputra, i. M. P., se, s., & si, m. (2014). Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa pakraman kubutambahan, kecamatan kubutambahan, kabupaten buleleng, provinsi bali (sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintahan)
- Muslimin, m., & Mappamiring, m. (2012). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa punagaya kecamatan bangkala kabupaten jenepono. *Otoritas: jurnal ilmu pemerintahan*, 2(1), 79-86.
- Surya, K., Thomas, Y., & Genjik S, B. (2013). Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(7).

- Arifiyanto, D. F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Financial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara Universitas Mulawarman*, 3(1).
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Pahala, I., Sudarma, M., Sutrisno, & Rosidi. (2016). Financial accountability on public service agency (BLU): Phenomenological study at the state university of jakarta. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(2), 11-27. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/1778455281?accountid=38628>
- Edwards, B., Yilmaz, S., & Boex, J. (2014). Local Government Discretion and Accountability in Sierra Leone. *Urban Institute Center on International Development and Governance Working Paper*, (2014-01).

## **Daftar Peraturan**

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekongkang Atas Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014  
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014  
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa  
Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan  
Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Tahun  
Anggaran 2016.

Peraturan Desa Maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa  
Barat Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran  
Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang  
Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 04 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Atas Perubahan Desa Nomor 01  
Tahun 2016 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun Anggaran 2016.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Dana  
Desa Tahun Anggaran 2016.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Alokasi  
Dana Desa Tahun Anggaran 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa.